



PEMERINTAH KOTA BATAM  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Engku Putri No. 1  
Telepon : (0778) 462164, Faksimile : (0778) 461349  
Email : [kominfo@batam.go.id](mailto:kominfo@batam.go.id), Website : <https://kominfo.batam.go.id>  
B A T A M

Kode Pos : 29464

PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KOTA BATAM  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1 Tahun 2017, dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan perubahan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Penjelasan atas Berita Negara Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2021) tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37
6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 941).

MEMPERHATIKAN : 1. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2017  
 2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022  
 3. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 2 Tahun 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas perubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan Nomor 1 Tahun 2017 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di Batam,  
 Pada tanggal Januari 2023



**PENETAPAN  
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
NOMOR 1 TAHUN 2023**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	OPD
1	Biodata Elektronik ASN (Database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Seluruh OPD
2	Dokumen/Berkas/Arsip ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Seluruh OPD
3	Daftar Nilai SKP ASN	UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian PP No. 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Prestasi Kerja ASN	2 Tahun	Mengungkap Prib Data ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Seluruh OPD
4	Daftar Kekayaan, Keuangan, Aset dan Pendapatan/rekening Bank ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Seluruh OPD
5	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Seluruh OPD

6	Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Seluruh OPD
7	Data Usulan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Sampai dengan Pelantikan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim Kondusif di lingkungan kerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Data rekam medis pasien (ASN) dan atau Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Seluruh OPD
9	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan Karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Seluruh OPD
10	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya Perpres 54 tahun 2010	Selama Proses Pengadaan barang/jasa	Merugikan proses penyusunan kebijakan Karena adanya pengungkapan secara system (informasi apabila menimbulkan penilaian tidak objektif)	Efisiensi Anggaran Karena diperoleh penawaran yang wajar	Seluruh OPD

11	Dokumen Penawaran Kontrak	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j	Selama Proses Pengadaan barang/jasa.	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Seluruh OPD
		2. Keppres No. 80 Tahun 2003 Beserta perubahannya	Tidak terbatas			
12	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ (Pasal 30-37)	Tidak Terbatas	Tindak Pengerusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	Dinas Kominfo
13	Internet Protokol/IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penerobosan/ penyalahgunaan Hak Akses	Menjaga/ melindungi akses Hak	Dinas Kominfo
14	Bandwith Management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan Kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Menjaga/ melindungi akses Hak	Dinas Kominfo
15	Kode akses Elektronik dan user/ password	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ (Pasal 1 angka 16)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan	Seluruh OPD

16	Sistem Keamanan Elektronik	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	Seluruh OPD
17	Sistem Management Database	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menajaga keamanan database	Seluruh OPD
18	Hasil : Pemeriksaan, Pemeriksaan kasus, pemeriksaan khusus, Review laporan keuangan, Evaluasi/Pemantauan Naskah hasil pemeriksaan NHP, Kertas Kerja Audit (KKA)/ Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 6 huruf c ayat 6 dan pasal 17 huruf l, Peraturan MENPAN No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan No. PER/05/M.PAN/03/2007 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah bab/no.4500 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat pengawas pemerintah, Lampiran I bab Norma pelaporan huruf a. Permendagri 51 tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemda	Tidak Terbatas	1. Menghambat Kebijakan Karena adanya pengungkapan secara sistem Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP Melanggar peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP Akan terjadi kesalahpahaman penerima informasi dengan sumber informasi apabila temuan-temuan tersebut belum ditindaklanjuti	Membantu Badan system dalam dan menentukan mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Inspektorat

19	Identitas saksi saksi pelapor, korban, keluarga dan/atau pihak yangterkait dan kondisi kesehatan korban/pasien/klien tindak kekerasan dalam rumah tangga yangmelapor	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP UU No 31 tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 poin a dan i Uu no 36 tahun 2009 pasal 57 ayat 1	Tidak Terbatas	Mengungkapkan kerahasiaan korban pelapor terhadap pelaku tindakkekerasan	Melindungi dan mengamankankorban	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB
20	Data Indentitas Keluarga Hasil pendataan keluarga dalam bentuk basis data keluarga Indonesia	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data keluarga dan masalahnya yang bersifat pribadi	Melindungi Identitas keluarga yang dapat dipergunakan oleh pihak lain	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB
21	Hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi seseorang ASN (Hasil test, Assesment, Psikotest)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Kode etik Psikologi	Tidak Terbatas	Menilai Opini tentang orang lain	Akan memberikan keleluasaan untuk mengevaluasi yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk peningkatan kapabilitas seseorang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

22	Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan satuan pendidikan formal dan nonformal ASN (Hasil diklat)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 ayat 1 huruf h	Tidak Terbatas	Karena membuka pribadi	berpotensi informasi	Melindungi hak pribadi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23	Arsip Digital data Pribadi Permohonan Izin meliputi : KTP permohonan izin (namanya dibuka); PBB tahun terakhir; NPWP pribadi; Surat bukti pemilikan tanah; Akta notaris.	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE pasal 26 dan pasal 32 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 ayat 1 huruf h	Tidak Terbatas	Karena membuka pribadi	berpotensi informasi	Melindungi hak pribadi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan se Kota Batam Kelurahan se Kota Batam
24	Arsip Digital Data Perusahaan permohonan izin meliputi : KTP pimpinan/direktur/pemilik (namanya dibuka) Nomor Pokok Wajib Pajak dan PKP pengusaha kena pajak. Akta pendirian perusahaan (Nomornya dibuka) Ijazah dan KTP penanggung jawab bidang Teknik Surat pengesahan kehakiman/pendaftaran pengadilan negeri (Nomornya dan nama dibuka) Gambar lokasi tepat usaha/ Gudang Gambar situasi/system rencana konstruksi Gambar/ denah tempat usaha Sertifikat tanah, akte jual beli, sewa tanah pernyataan pemilik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 26 dan Pasal 32 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat 1 huruf h	Tidak Terbatas	Karena membuka pribadi	berpotensi informasi	Melindungi/mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia dari persaingan usaha yang tidak sehat atau penipuan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan se Kota Batam Kelurahan se Kota Batam



25	<p>Arsip Digital Data Pribadi Permohonan Izin meliputi :Gambar alokasi Gambar rencana Gambar denah Gambar Instalasi listrik, air minum, air kotor, dsb Gambar konstruksi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Uraian rencana proyek yang akan di bangun Peta Lokasi Peta penggunaan detail tanah Peta tata ruang lokasi Peta site plan/ blok plan Rencana tahapan pembangunan Photo lokasi Izin lain yang dipersyaratkan Surat rekomendasi</p>	<p>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 26 dan Pasal 32 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat 1 huruf h</p>	Tidak Terbatas	<p>Karena berpotensi membuka informasi pribadi</p>	<p>Melindungi/mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia dari persaingan usaha yang tidak sehat atau penipuan</p>	<p>Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan se Kota Batam Kelurahan se Kota Batam</p>
26	<p>Database perizinan meliputi :Nama dan alamat pimpinan Jumlah yang akan dibayarkan</p>	<p>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 26 dan Pasal 32 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf l dan pasal 16 huruf b</p>	Tidak Terbatas	<p>Membuka informasi pribadi</p>	<p>Melindungi/mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia</p>	<p>Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan se Kota Batam Kelurahan se Kota Batam</p>

27	<p>Izin mendirikan bangunan, Izin lokasi, 10.Penggalian ruang milik jalan, 11.Pembuatan jalan masuk pekarangan, 12.Penutupan/penggunaan trotoar, berm, saluran, Pematangan lahanatau tanah, Pembuatan jalan masuk di komplek perumahan, pertokoan dan sejenisnyaPemanfaatan titik tiang pancang reklame, Reklame,17.Penyclenggaraan angkutan trayck, 18.Pengelolaan tempat parkir,19.Usaha angkutan, 20.Jasa titipan, 21.Pembuangan air buangan ke sumber air, Pengelolaan airbawah tanah, Pengambilan air permukaan, Perubahan alur, bentuk, dimensi dan kemiringan dasar sungai/ saluran, Pembangunan lintasan yangberada di bawah/ di atasnya, Pemanfaatan bangunan pengairandan lahan pada daerah sampadan sungai,Pemanfaatan lahan mata air dan lahan pengairan lainnya pengairan lainnya</p>	<p>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 26 dan Pasal 32 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf l dan pasal 16 huruf b</p>	Tidak Terbatas	Membuka informasi pribadi	Melindungi/mengamank an data pribadi yang bersifatrahasia	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan se Kota Batam Kelurahan se KotaBatam
----	--	---	----------------	---------------------------	---	---

28	Rencana Pembelian Tanah dan Properti	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e angka 4	Sampai selesainya proses pembebasan tanah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mencegah spekulasi tanah	Seluruh OPD
29	Biodata TKA (Tenaga Kerja Asing)	1. UU. No.13 Tahun 2003 2. UU. No. 11 Tahun 2020 3. UU. No. 34 Tahun 2021 4. Permenakertrans RI No. 17 Tahun 2013	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi TKA yang bersifat pribadi	Melindungi data/keterangan perusahaan dan pekerja yang dirahasiakan	Dinas Tenaga Kerja
30	Berita Acara Pemeriksaan	UU NO.8 Tahun 1981 tentang KUHP Pasal 1 angka 2	Tidak Terbatas	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia	Seluruh OPD
31	Data Perseorangan dan dokumen kependudukan	Pasal 79 ayat 1, pasal 95A UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 83 ayat 2 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Pasal 59 sd 64 Permendagri No 25 tahun 2011 tentang pedoman pengkajian, pengembangan dan pengelolaan system informasi administrasi kependudukan	Sampai dengan terbitnya izindari Walikota	Penyalahgunaan data kependudukan Mengungkap data pribadi penduduk yang semestinya terjaga kerahasiaannya	Terhindarnya penyalahgunaan data kependudukan Terjaganya kerahasiaan data pribadi penduduk	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kecamatan se Kota Batam Kelurahan se Kota Batam

32	User/ Password SIPKD Keuangan, TEPR, SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), KTP, E-KTP, Aplikasi BOS, PPDB, dan SIRUP	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan dan privasi computer	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kominfo BAPELITBANG Dinas Pendidikan
33	SPJ/ alat bukti Pertanggungjawaban Keuangan akan tetapi yang dapat dibuka adalah laporan hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan ke legislatif	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2014 PP No. 70 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013	Tidak Terbatas	Dikhawatirkan adanya pemanfaatan/penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggungjawab dan akan menimbulkan ketidakpastian Hukum	Menjaga informasi mengenai SPJ/ Alat bukti pertanggungjawaban keuangan pada DPPA pada kecamatan	Seluruh OPD
34	Data Pemohon KTP dan KK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf permendagri no 61 tahun 2015	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi masyarakat	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kecamatan se Kota Batam Kelurahan se Kota Batam

35	Data Individu Client HIV	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesakitan Pasal.57 PMK No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Pasal 6-14 UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 38-39 PMK no. 21 tahun 2013 tentang Penganggulangan HIV dan AIDS pasal 21	Tak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi Klien dapat terjadi Stigma dan Diskriminasi	Melindungi data pribadi masyarakat	Dinas Kesehatan RSUD Embung Fatimah
36	Data Individu Pasien TB	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesakitan Pasal.57 PMK No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Pasal 6-14 UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 38-39	Tak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi Klien dapat terjadi Stigma dan Diskriminasi	Melindungi data pribadi masyarakat	Dinas Kesehatan RSUD Embung Fatimah
37	Data Pribadi Kusta	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesakitan Pasal.57 PMK No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Pasal 6-14 UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 38-39	Tak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi Klien dapat terjadi Stigma dan Diskriminasi	Melindungi data pribadi masyarakat	Dinas Kesehatan RSUD Embung Fatimah

38	Daftar Nama Siswa, Biodata, Kondisi Ekonomi, sosial (terlibat dalam proses hukum), Nilai akademik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 2. UU No. 23 tentang Perlindungan Anak	Dikecualikan sampai ada izin dari Wali siswa	Mengungkapkan data pribadi dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan nonformal, membuka akses penyalahgunaan data informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dapat membuka akses kejahatan sosial	Keselamatan siswa dari upaya kriminal dan penyalahgunaan lainnya dapat dihindari	Dinas Pendidikan
39	Laporan Keuangan yang belum diverifikasi oleh Auditor	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf e dan pasal 17 huruf i	Tidak terbatas, sampai ada keputusan yang lebih tinggi	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature, dapat menimbulkan keresahan masyarakat	Menjaga iklim kondusif di lingkungan sekolah SKPD dan Pemerintah Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendidikan
40	Hasil :Laporan Sementara hasil pemeriksaan SPI (Satuan Pengawasan Intern), dan Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf e dan pasal 17 huruf i. Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan No PEWR/05/M.PAN/03/2008 tentang standar audit pengawasan intern Pemerintah, bab/no.4500	Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature, Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP, Melanggar Peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LH	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Inspektorat

41	Register SP2D ditutup akan tetapi Dapat dibuka kalau yang meminta informasi kompeten dalam bidangnya	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 pasal 17 huruf i.	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga kerahasiaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
42	Laporan Keuangan yang belum diaudit BPK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i. Undang undang 15 tahun 2004 pasal 19	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga kerahasiaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendidikan
43	Rekam Medis Pasien di Rumah Sakit	Permenkes No. 269/ Menkes/Per/III/2008 BAB IV Penyimpanan, Pemusnahan dan Kerahasiaan (Pasal 8 , Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11)	Tidak Terbatas	Kesalahfahaman pasien/keluarga terhadap tindakan atau pengobatan terhadap pasien karena menggunakan Bahasa medis, kesalahfahaman inisering berujung Pada gugatan Malpraktek	Menjaga kerahasiaan	Dinas Kesehatan RSUD Embung Fatimah
44	Data Rekam Medis Pasiendi Puskesmas	UU No. 14 tahun 2007 tentang KIP Pasal 6 ayat (17) huruf h	Tidak Terbatas	Pengungkapan Data Pribadi/penyakit seseorang/ ASN	Menjaga kerahasiaan	Dinas Kesehatan
45	Pembayaran Pajak yang Dilakukan oleh masing masing WP	UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak Perda No. 20 Tahun 2012 Bab 10 Pasal 83	Tidak Terbatas	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data WP yang bersifat Rahasia	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)
46	Sistem Persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c angka 6	Tidak Terbatas	Membahayakan pertahanan dan Keamanan Negara	Melindungi Kerahasiaan system persandian	Dinas Kominfo
47	Dokumen Kontrak	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17	Selama Dalam Proses	Penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain	Menjaga kerahasiaan dokumen	Seluruh OPD

		huruf I dan j 2. PP No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya(Akan Ditambahkan)				
48	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17	Sampai peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang Kota Batam disahkan	Akan memberikan informasi rencana kota yang simpang siur sebab selama proses legalisasi peraturan daerah, substansi peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang belum bersifat pasti	Menjaga iklim kondusif di Kota Batam	Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah
49	Berkas-berkas / data data terkait dengan tataruang dan bangunan yang masih dalam proses perkara di pengadilan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang sudah final dan berkekuatan hukum tetap pada tingkat akhir	Mempengaruhi proses perkara	Melindungi data yang masih berproses dalam pengadilan sampai tingkat akhir	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pendidikan
50	Data surat perintah penyegehan yang masih dalam proses	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat melindungi data pemerintah	Seluruh OPD



51	Data surat perintah pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang dan bangunan yang masih dalam proses	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat melindungi data pemerintah	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
52	Dokumen teknis IMB	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat melindungi data pemerintah	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
53	Dokumen pendataan bangunan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat melindungi data pemerintah	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pendidikan
54	Dokumen rincian bangunan terkena proyek penghapusan milik pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat melindungi data pemerintah	Seluruh OPD
55	Dokumen Pertelaan Bangunan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat melindungi data pemerintah	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
56	Dokumen hasil penilaian terhadap asset pemerintah yang akan dihapuskan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat melindungi data pemerintah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
57	Dokumen hasil verifikasi SLF (sertifikat laik fungsi)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi data pribadi	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

58	Simpanan berjangka dan Tabungan anggota Koperasi	PP No. 9 Tahun 1995 pasal 15 ayat 1 dan ayat 2	Tidak Terbatas	Melanggar prinsip kerahasiaan yang pada akhirnya menciptakan kondisi persaingan yang tidak sehat	Tidak ada manfaatnya jika dibuka	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
59	Laporan Pertanggungjawaban Koperasi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Melanggar prinsip Kerahasiaan yang pada akhirnya menciptakan kondisi persaingan yang tidak sehat	Tidak ada manfaatnya jika dibuka	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
60	Daftar pinjaman anggota koperasi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Melanggar prinsip kerahasiaan yang pada akhirnya menciptakan kondisi persaingan yang tidak sehat	Tidak ada manfaatnya jika dibuka	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
61	Data Industri	UU No. 3 tahun 2014 tentang perindustrian pasal 64 ayat 1, 65 ayat 1, pasal 69, pasal 70 ayat 2 dan penjelasan pasal 69	Selama UU No. 03 tahun 2014 berlaku	Dikenai sanksi administratif sesuai pasal 70 ayat 2, menciderai perlindungan hak kekayaan intelektual dan berdampak persaingan usaha tidak sehat	Tidak ada manfaatnya jika dibuka	Dinas Perdagangan dan Perindustriann

62	Arsip keterangan silsilah waris	UU. No 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Dikhawatirkan adanya pemanfaatan / penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab	Menjaga informasi waris mengenai data kepemilikan individu perorangan menyangkut privasi kepemilikan pribadi perorangan/ keluarga masyarakat	Seluruh OPD
63	Alat Bukti Kasus	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Sampai kasus selesa	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga informasi untuk kelancaran proses penegakan hukum	Seluruh OPD
64	Dokumen penanganan perkara	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Sampai kasus selesai	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga informasi untuk kelancaran proses penegakan hukum	Seluruh OPD
65	Opini Hukum	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Sampai kasus selesai	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga informasi untuk kelancaran proses penegakan hukum	Seluruh OPD
66	Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Sampai kasus selesai	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga informasi untuk kelancaran proses penegakan hukum	Seluruh OPD
67	Kasus hukum yang masih dalam proses	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Sampai kasus selesai	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga informasi untuk kelancaran proses penegakan hukum	Seluruh OPD

68	Modul diklat di luar forum pelatihan	Undang undang No.28 tahun 2014	Tidak terbatas	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga kerahasiaan dokumen	Seluruh OPD
69	Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa	Perpres 54 tahun 2010	Tidak terbatas	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga kerahasiaan dokumen	Seluruh OPD
70	Dokumen lelang dan kontrak kerjasamapemerintah dan swasta	Perpres 54 tahun 2010	Tidak terbatas	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kckayaanintelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga kerahasiaan dokumen	Seluruh OPD
71	Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa	Perpres No.04 tahun 2015	Sampai proses selesai	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga kerahasiaan dokumen	Seluruh OPD

72	Inovasi hasil Litbang yang belum mendapatkan hak paten	Undang undang No.28tahun 2014	Tidak terbatas	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga kerahasiaan dokumen	Seluruh OPD
73	Rckomendasi teknis Litbang yang apabila diberikan dapat mengganggu persaingan usaha	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga kerahasiaan dokumen	Seluruh OPD
74	Kepentingan Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual atas teknologi pertanian	Undang undang No. 28 tahun 2014	Tidak terbatas	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga kerahasiaan dokumen	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
75	Hasil Uji Laboratorium tentang keamanan pangan produk segar	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga kerahasiaan dokumen	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

76	Dokumen Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan PVT)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga kerahasiaan dokumen	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
77	Titik Koordinat Kampung Tua	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kelancaran proses penegakan hukum	Dinas Pertanahan
78	Data dan Informasi menyangkut kegiatan pengawasan dan kegiatan penegak hukum terhadap dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga informasi untuk kelancaran proses penegakan hukum	Dinas Lingkungan Hidup
79	Data-data perusahaan di kota Batam menyangkut pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang bersifat khusus (ketaatan pelaporan izin lingkungan, izin penyimpanan limbah b3, izin pengelolaan limbah cair)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kelancaran proses penegakan hukum	Dinas Lingkungan Hidup
80	Hasil Analisa laboratorium untuk kegiatan pengawasan dan penegakan hukum	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kelancaran proses penegakan hukum	Seluruh OPD

81	Data dan informasi produk perikanan yang terindikasi terkontaminasi dan/atau tercemar oleh zat-zat bahan berbahaya	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Sampai hasil laboratorium keluar	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kelancaran proses penegakan hukum	Dinas Perikanan
82	Hasil penelitian Mutu Eksternal (PME) laboratorium kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kelancaran proses penegakan hukum	Dinas Kesehatan
83	Hasil visitasi fasilitas pelayanan kesehatan CTKI, laboratorium, klinik	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kelancaran proses penegakan hukum	Dinas Kesehatan
84	Dokumen hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi pelanggaran tata/tertib kode etik anggota dprd oleh badan kehormatan dprd	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 PP 16 Tahun 2010 Pasal 61 ayat 4	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga kerahasiaan dokumen	Sekretariat DPRD
85	Identitas anggota perpustakaan dan pemustaka	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat pribadi	Melindungi data/keterangan yang dirahasiakan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

86	Kerahasiaan data wajib pajak (WP)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah daerah, bagian ke tujuh pasal 103	Terbatas	Mengungkap data wajib pajak (WP) yang bersifat rahasia	Melindungi kerahasiaan data wajib pajak (WP)	Badan Pendapatan Daerah
----	-----------------------------------	---	----------	--	--	-------------------------

Menyetujui,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KOTA BATAM  
Selaku PPD Kota Batam



AZRIL APRIANSYAH, ST,MT.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730408 200212 1 005